AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No.2, 2026
https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/index
E-ISSN 2721-6160 (*online*) P-ISSN 2830-4207(cetak)

Janji yang Ingkar, Kuasa yang Sewenang-wenang: Menimbang Nondominasi, Rekayasa Sosial, dan Arah Teknologi dalam Karya Daron Acemoglu

Unu Putra Herlambang, Muhamad Hasan Muaziz
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
unuherlambang@unusia.ac.id

Article Info

Received: *2026-09-10*
Revised: *2026-10-02*
Accepted: *2026-10-24*

DOI:
https://doi.org/10.47776/alwasath.v7i2/2230

Keywords:
Liberal Democracy; Nondomination; Social Engineering; Deliberation

Kata Kunci:
Demokrasi Liberal; Nondominasi; Rekayasa Sosial; Deliberasi

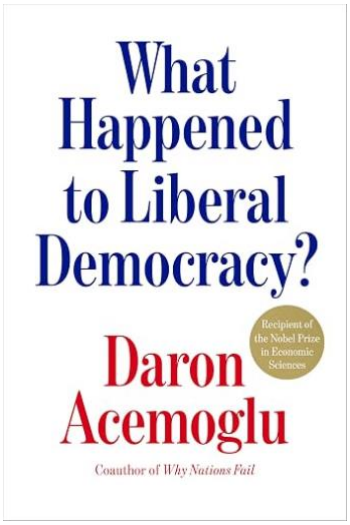
Abstract

This review does not summarize Daron Acemoglu's What Happened to Liberal Democracy? Remaking a Politics of Shared Prosperity (2026) chapter by chapter. It first reconstructs the book's architecture, in which four premises, beginning with fallibility, yield four pillars of liberalism, and then tests five core ideas against the book's own standards: the three promises of democracy, nondomination as the measure of freedom, social engineering as a disease of educated elites, technology as a direction that can be chosen, and deliberation as a source of legitimacy. The review argues that the book's main contribution lies in shifting the measure of freedom from the absence of interference to the absence of arbitrary power. Its weaknesses lie in two connected points. Nondomination is justified mainly on epistemic grounds, which leaves it exposed to calculations of usefulness, and the lines that govern its application are delegated to judges, whether regulators or deliberative forums, who are not themselves tested against nondomination. The book offers these judges deliberative virtues but no mechanism through which they can be contested. Its remedies, particularly deliberation and pro-worker AI, are more persuasive as directions than as tested programs.

Abstrak

Ulasan ini tidak merangkum buku Daron Acemoglu, What Happened to Liberal Democracy? Remaking a Politics of Shared Prosperity (2026), bab demi bab. Ulasan ini lebih dahulu merekonstruksi arsitektur buku, yaitu empat premis yang diawali falibilitas dan menurunkan empat pilar liberalisme, lalu menguji lima gagasan intinya dengan ukuran buku itu sendiri: tiga janji demokrasi, nondominasi sebagai ukuran kebebasan, rekayasa sosial sebagai penyakit elite terdidik, teknologi sebagai arah yang dapat dipilih, dan deliberasi sebagai sumber legitimasi. Argumen ulasan ini ialah bahwa sumbangan terbesar buku terletak pada pergeseran ukuran kebebasan dari ketiadaan campur tangan ke ketiadaan kuasa sewenang-wenang. Kelemahannya terletak pada dua titik yang saling berkaitan. Nondominasi dibela terutama atas dasar epistemik sehingga rentan terhadap perhitungan kegunaan, sedangkan garis-garis yang menentukan penerapannya diserahkan kepada penilai, baik pembuat regulasi maupun forum deliberatif, yang tidak ikut diuji dengan ukuran nondominasi. Buku ini membekali para penilai itu dengan kebajikan deliberatif, tetapi tidak dengan mekanisme untuk menyanggah mereka. Obat yang ditawarkan, terutama deliberasi dan AI pro-pekerja, lebih meyakinkan sebagai arah daripada sebagai program yang teruji.

Copyright: © 2026. The Authors (Unu Putra Herlambang, Muhamad Hasan Muaziz) Licensee: AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum. This work is licensed under the Creative Commons Attribution Noncommercial Share Alike 4.0 License.
How to Cite: Unu Putra Herlambang, Muhamad Hasan Muaziz, "Janji yang Ingkar, Kuasa yang Sewenang-wenang: Menimbang Nondominasi, Rekayasa Sosial, dan Arah Teknologi dalam Karya Daron Acemoglu", *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum 7 No.2 (2026)*: 141-152. https://doi.org/10.47776/alwasath.v7i2/2230



Judul *What Happened to Liberal Democracy? Remaking a Politics of Shared Prosperity*
Penulis Daron Acemoglu
Penerbit New York: Dutton, 2026; edisi Britania Raya: London: Profile Books, 2026
Tebal 416 halaman (cetak)
ISBN 978-1-80522-864-6
eISBN 978-1-80522-866-0

Pendahuluan: Dari Alun-Alun Budapest Ke Pertanyaan Yang Tidak Nyaman

Pada 16 Juni 1989, enam peti jenazah diletakkan di bawah tangga kolonade Műcsarnok di Budapest. Lima peti berisi jenazah Perdana Menteri Imre Nagy dan rekan-rekannya yang dieksekusi Soviet pada 1958, sedangkan peti keenam sengaja dibiarkan kosong untuk mewakili korban tanpa nama dari pemberontakan yang gagal. Di hadapan seperempat juta orang yang memenuhi alun-alun, pidato terakhir disampaikan seorang pemuda berjanggut dari Fidesz, Viktor Orbán, yang menuntut pemilu bebas dan penarikan pasukan Soviet.[1] Pada 2014, orang yang sama mengumumkan bahwa ia sedang "membangun negara iliberal" (*building an illiberal state*). Ia juga memusatkan kekuasaan eksekutif di tangannya, menekan kebebasan berbicara, dan menutup media serta universitas.[2]

Daron Acemoglu membuka *What Happened to Liberal Democracy?* dengan adegan itu karena untuk memadatkan teka-teki bukunya, yaitu mengapa optimisme besar di akhir Perang Dingin berubah menjadi krisis sampai salah satu pembela kebebasan paling lantang pada 1989 menjadi lambang antiliberalisme. Jawabannya ia cari pada liberalisme sendiri. Setelah menjadi mapan dan dianut sebagian besar politisi, birokrat, dan aktivis, liberalisme tidak menyesuaikan diri dengan kenyataan baru dan kehilangan sebagian nilainya. Kegagalan itu Acemoglu rumuskan dengan idiom teologis sebagai dua dosa. Dosa kelalaian (*sin of omission*) ialah keengganan demokrasi liberal mencari jalan keluar bagi persoalan pascaindustri yang paling berat menimpa kelompok berpendidikan rendah. Dosa tindakan (*sin of commission*) ialah penanggalan komitmen pada swapemerintahan (*self-government*), komunitas, dan kemakmuran bersama (*shared prosperity*) oleh elite terdidik pascaindustri, yang kemudian berpaling pada rekayasa sosial.[3]

Obat yang ia tawarkan disebutnya "liberalisme kelas pekerja" (*working-class liberalism*). Istilah ini mudah terbaca sebagai politik identitas kelas, padahal yang dimaksud ialah liberalisme yang menempatkan komunitas, swapemerintahan, keamanan ekonomi, dan kepentingan kelas pekerja di pusat agendanya. Acemoglu menegaskan bahwa gagasan itu tidak ia ajukan sebagai konsesi untuk meredam reaksi balik. Liberalisme, menurutnya, justru akan lebih kuat dan lebih setia pada dasar pembenarnya sendiri bila mengambil bentuk ini.[4]

[1] Daron Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy? Remaking a Politics of Shared Prosperity* (Profile Books, 2026), 1–2. Seluruh kutipan berbahasa Inggris dalam ulasan ini diterjemahkan oleh pengulas.
[2] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 2.
[3] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 16–18.
[4] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 28.

Ulasan ini tidak menelusuri buku bab demi bab. Pengulas menempuh jalan lain, yaitu merekonstruksi lebih dahulu kerangka argumen buku, rangkaian premis yang menopang seluruh usulnya, lalu menguji lima gagasan utamanya dengan ukuran yang ditetapkan buku itu sendiri. Kelima gagasan itu ialah: (1) tiga janji demokrasi dan ironi di sekitar selokan, (2) nondominasi sebagai ukuran kebebasan, (3) rekayasa sosial sebagai penyakit elite, (4) teknologi sebagai arah yang dapat dipilih, dan (5) deliberasi sebagai sumber legitimasi. Tesis ulasan ini memiliki dua sisi. Sumbangan terbesar buku ini terletak pada pergeseran ukuran kebebasan dari ketiadaan campur tangan ke ketiadaan kuasa sewenang-wenang. Kelemahan terbesarnya terletak pada pengandaian yang tidak dinyatakan bahwa selalu tersedia penilai, entah pembuat regulasi entah forum deliberatif, yang mampu menarik garis antara yang esensial dan yang berlebihan tanpa ikut diuji dengan ukuran nondominasi. Bagian ketujuh menunjukkan bahwa premis pertama buku ini sendiri, yaitu falibilitas, justru menuntut agar penilai itu dapat disanggah.

Kerangka Argumen: Dari Falibilitas ke Nondominasi

Kekuatan dan kelemahan buku ini lebih mudah dinilai bila kerangkanya dibentangkan lebih dahulu. Pada Bab 2, Acemoglu menurunkan liberalismenya dari empat premis yang ia anggap jelas dengan sendirinya secara normatif atau didukung kuat oleh pengetahuan ilmiah, historis, dan sosiologis.[5] Premis pertama ialah falibilitas, bahwa setiap keyakinan, proposisi, atau pengetahuan dapat keliru, bahkan keliru secara spektakuler. Premis kedua ialah pembelajaran sosial dalam komunitas, sebab pengetahuan hanya berguna bila dapat dibagi dan dipercaya. Premis ketiga ialah perbaikan epistemik yang lembut, yaitu kecenderungan keyakinan keliru untuk memudar secara perlahan selama tersedia ruang debat dan pertukaran informasi yang terbuka. Premis keempat ialah keinginan terhadap pengetahuan kolektif, yang ia perlakukan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mencapai beragam tujuannya.[6]

Dari keempat premis itu, Acemoglu menurunkan empat pilar. Pilar pertama ialah vitalitas eksperimentasi, karena falibilitas dan perbaikan epistemik yang lembut menuntut masyarakat untuk terus mencoba hal baru. Pilar kedua ialah nondominasi dan swapemerintahan, pilar ketiga ialah pertumbuhan ekonomi, dan pilar keempat ialah komunitarianisme lunak (*soft communitarianism*), yaitu penghargaan terhadap komunitas yang tetap waspada terhadap kekangannya. Keempat pilar itulah yang dalam penerapan kontemporernya ia sebut liberalisme kelas pekerja.[7] Susunan ini menentukan cara membaca seluruh buku, sebab nondominasi tidak berdiri sebagai nilai pertama, tetapi diturunkan dari kebutuhan akan eksperimentasi, sedangkan eksperimentasi diturunkan dari falibilitas. Dengan kata lain, liberalisme Acemoglu adalah liberalisme epistemik: kebebasan dibela terutama karena masyarakat yang bebas lebih mampu belajar.

Kerangka ini adalah kekuatan pertama buku. Ia memberi liberalisme dasar yang tidak bergantung pada kontrak sosial yang hipotetis, dan sekaligus menjelaskan mengapa komunitas, yang kerap dicurigai kaum liberal, justru diperlukan oleh kebebasan. Kerangka yang sama juga memikul beban yang akan diuji pada bagian-bagian berikut. Bila setiap pengetahuan dapat keliru, pengetahuan para penilai tentang regulasi mana yang esensial, perubahan nilai mana yang sah, dan teknologi mana yang pro-pekerja pun dapat keliru. Premis pertama buku ini, karenanya, tidak hanya membenarkan eksperimentasi, tetapi juga menuntut agar setiap penilai dapat dipersoalkan.

[5] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 39.
[6] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 39–51.
[7] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 55–66.

Selokan Sebagai Ukuran Legitimasi Dan Paradoks Prosedur

Penerimaan luas atas demokrasi liberal pada 1990-an, menurut Acemoglu, bertumpu pada tiga janji. Janji pertama, *sharing* atau pembagian, menjanjikan bahwa hasil perubahan ekonomi dan teknologi dibagi antara mereka yang berkecukupan dan mereka yang tidak, sebagaimana sudah dipahami Gerakan Chartist di Inggris pada 1840-an ketika menyebut hak pilih universal sebagai "pertanyaan pisau dan garpu, pertanyaan roti dan keju" (*a knife and fork question, a bread and cheese question*). Janji kedua, *drains* atau selokan, menjanjikan layanan publik dasar, dengan istilah yang dipinjam dari larik penyair Inggris John Betjeman tentang "demokrasi dan selokan yang layak" (*democracy and proper drains*). Janji ketiga, *voice* atau suara, menjanjikan kebebasan berpendapat dan swapemerintahan.[8]

Selokan dalam rumusan ini adalah metafora bagi layanan yang bekerja tanpa terlihat, yaitu kesehatan, pendidikan, jalan, dan sanitasi. Orang tidak memikirkan pembuangan air ketika berjalan di taman kota dan baru memikirkannya ketika saluran mampat. Layanan semacam itu, menurut Acemoglu, menjadi begitu penting bagi demokrasi karena banyak rezim nondemokratis hampir sepenuhnya mengabaikan kesehatan, pendidikan, jalan, dan selokan. Di kota-kota industri Inggris awal abad kesembilan belas, sebelum demokratisasi berjalan, usia harapan hidup saat lahir turun di bawah tiga puluh tahun. Jalan-jalan kota berbau busuk karena digenangi limbah industri. Di Brasil, pemilih miskin berpendidikan rendah baru dapat memilih secara efektif setelah mesin pemungutan suara bergambar diperkenalkan pada 1998, dan partai-partai sesudahnya mulai menjanjikan perawatan ibu dan anak.[9] Bagi pembaca hukum pemilu, contoh terakhir ini memuat pelajaran umum bahwa pengaturan teknis pemungutan suara menentukan siapa yang diperhitungkan, dan karena itu ikut menentukan apa yang diberikan negara kepada warganya.

Abad kedua puluh, dalam uraiannya, memperlihatkan bahwa ketiga janji itu pernah dipenuhi. Kematian pekerja turun tajam setelah Federal Meat Inspection Act 1906 dan undang-undang sejenis diberlakukan, warga biasa ikut memerintah kota-kotanya, dan pemilih kelas pekerja Inggris seusai Perang Dunia II memilih pemerintahan Partai Buruh yang menjanjikan negara kesejahteraan.[10] Setelah 1980 gambarnya berbalik. Upah median riil di Amerika Serikat, yang naik lebih dari 2,5 persen per tahun antara 1948 dan 1973, hanya tumbuh 0,45 persen per tahun sejak 1980. Upah pekerja manual dan mereka yang tidak bergelar sarjana menurun, sementara porsi pendapatan nasional kaum 1% super kaya naik dari sekitar 10 persen pada 1980 menjadi 19 persen pada 2019.[11]

Penjelasan tentang kegagalan janji kedua paling layak diperiksa, sebab Acemoglu tidak berhenti pada tuduhan bahwa negara abai. Sebagian kegagalan itu, menurutnya, terjadi karena buatan sendiri. Proyek terowongan Big Dig di Boston dijadwalkan selesai pada 1998 dengan biaya 2,6 miliar dolar, tetapi baru rampung pada 2007 dengan biaya sekitar tiga kali lipat, sedangkan perbaikan Jembatan Longfellow menuntut persetujuan begitu banyak lembaga federal, negara bagian, dan kota sehingga perencanaan dan persetujuannya saja memakan empat tahun. Janji sederhana tentang selokan yang andal, simpulnya, telah berubah menjadi "mimpi buruk ala Kafka" (*Kafkaesque nightmare*).[12] Akar masalahnya ia temukan pada prosedur *ex ante*, yaitu langkah yang harus dituntaskan sebelum proyek dimulai. Prosedur itu lahir dari niat yang sah untuk menjamin akses setara dan kesetaraan di depan hukum, tetapi hasilnya ialah terlalu banyak "pemain veto" (*veto players*) yang dapat memblokir atau memperlambat proyek.[13]

Pembaca hukum mengenali paradoks ini dari hukum administrasi. Setiap lapisan prosedur, bila dilihat sendiri, menjaga keadilan, tetapi jumlah seluruh lapisan itu ialah kelumpuhan yang

[8] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 5–6.
[9] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 5–6.
[10] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 9.
[11] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 9–10.
[12] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 12–13.
[13] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 289.

menggerus kepercayaan pada demokrasi. Usul Acemoglu terdiri atas dua langkah. Langkah pertama memangkas prosedur *ex ante* yang tidak esensial, misalnya izin bagi penata rambut dan terapis pijat, aturan yang mengejar tujuan sosial luas seperti kuota keragaman, serta kajian lingkungan yang berulang. Langkah kedua menggantinya dengan akuntabilitas *ex post*, yaitu pertanggungjawaban sesudah keputusan diambil, dengan Bank Sentral Amerika Serikat (Federal Reserve) sebagai contoh. Bank Sentral Amerika Serikat memutuskan kebijakan tanpa campur tangan pihak luar, tetapi kemudian dapat dimintai keterangan oleh legislatif, lembaga pengawas, dan masyarakat sipil.[14] Ia juga mengakui bahwa rezim akuntabilitas *ex post* baru dapat bekerja secara sistematis bila jenis pelanggaran dan cara penanganannya dirumuskan lebih dahulu.[15]

Usul ini sudah melampaui keluhan, tetapi belum sampai pada kriteria. Daftar contoh itu berfungsi sebagai ilustrasi, sedangkan garis pemisah antara regulasi yang "benar-benar kritis" dan regulasi yang boleh dipangkas tidak dirumuskan, padahal garis itulah yang paling sering diperebutkan. Satu petunjuk memang tersedia, yaitu pandangannya bahwa regulasi prosedural sering kali merupakan cara yang tidak efektif untuk mencapai tujuan sosial yang luas, sehingga pajak karbon dan dorongan bagi teknologi hijau lebih berdaya guna untuk melawan perubahan iklim daripada prosedur kajian dampak lingkungan yang tidak berujung.[16] Petunjuk itu adalah kriteria pilihan instrumen, bukan kriteria esensialitas. Ia menjawab pertanyaan tentang cara terbaik mencapai suatu tujuan, tetapi tidak menjawab pertanyaan tentang perlindungan mana yang tidak boleh dikorbankan. Pengakuan bahwa pelanggaran harus dirumuskan lebih dahulu juga hanya memindahkan beban tanpa memikulnya, sebab rumusan pelanggaran yang jelas, pengawas yang mandiri, dan penegakan yang dapat dipercaya adalah prasyarat yang tidak dapat diandaikan begitu saja. Tanpa ketiganya, pemangkasan prosedur *ex ante* berarti hilangnya pengaman tanpa pengganti.

Janji ketiga, suara, ia bahas dengan contoh yang tidak nyaman bagi pembaca liberal. Pada pemilu federal 2025, partai antiimigran Alternative für Deutschland (AfD) mendekati separuh suara di sebagian bekas Jerman Timur, tetapi partai-partai lain sepakat tidak berkoalisi dengannya. Acemoglu mengakui bahwa strategi itu mungkin memperlambat kebangkitan gerakan tersebut dan melindungi kebebasan dasar imigran serta minoritas etnis, tetapi akibatnya jutaan warga Jerman merasa suara demokratisnya dibungkam.[17] Ia tidak menyimpulkan bahwa strategi itu keliru. Yang ia tunjukkan ialah harga yang jarang dihitung: perlindungan demokrasi dari lawan antidemokrasi dapat dialami sebagai pembungkaman oleh pemilih yang tidak merasa dirinya antidemokrasi. Hukum pemilu, dengan demikian, perlu menimbang harga itu secara tersendiri ketika merancang mekanisme perlindungan demokrasi.

Nondominasi: Ukuran Yang Kuat, Pembenaran Yang Rapuh

Tiga janji menjelaskan apa yang hilang, sedangkan ukuran untuk menilai kehilangan itu ialah nondominasi (*nondomination*). Liberalisme klasik mendefinisikan kebebasan sebagai noninterferensi (*noninterference*), yaitu keadaan ketika negara tidak melarang seseorang berpikir atau bertindak. Acemoglu menerima ukuran ini sebagai titik awal yang baik, tetapi menilainya tidak memadai, lalu beralih ke tradisi republikan Skinner, Pettit, dan Lovett, yang menolak kehidupan "di bawah belas kasihan pihak lain", yaitu kehidupan yang rentan terhadap kerugian yang dapat ditimpakan pihak lain secara sewenang-wenang.[18]

Perbedaan kedua ukuran itu ia jelaskan, mengikuti Pettit, dengan analogi kuda. Kuda dengan "tali kekang longgar" (*free reins*) masih berada di tangan penunggang yang hanya memilih untuk tidak

[14] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 289–290.
[15] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 290.
[16] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 290.
[17] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 15.
[18] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 58.

menariknya, sehingga kebebasannya bergantung pada kebaikan hati penunggang. Kuda yang benar-benar bebas ialah kuda "tanpa tali kekang" (*no reins*), karena penunggang bahkan tidak punya pilihan untuk berubah pikiran.[19] Pada manusia, ukuran itu dirumuskan dalam "uji tatapan mata" (*eyeball test*) Pettit yang dikutip Acemoglu bahwa orang harus cukup terlindungi dalam pilihan-pilihan dasar hidupnya sehingga dapat menatap mata orang lain tanpa alasan untuk takut atau tunduk. Orang yang takut keluarganya kelaparan bila ia dipecat majikan, kata Acemoglu, berada dalam dominasi, dan orang semacam itu jelas tidak akan lulus uji tatapan mata.[20] Ilustrasi tambahan memperjelas perbedaannya. Seorang pekerja harian menurut hukum bebas berbicara dan berserikat, tetapi ia tahu bahwa satu kalimat yang tidak berkenan dapat membuatnya kehilangan pekerjaan minggu depan. Dengan ukuran noninterferensi, pekerja itu bebas. Dengan ukuran nondominasi, ia tidak.

Ukuran ini menjadi poros buku karena menghubungkan kebebasan sipil-politik dengan keamanan sosial-ekonomi, dua hal yang dalam wacana hukum kerap dipisahkan. Dari satu arah, nondominasi membenarkan redistribusi moderat dan jaring pengaman sosial tanpa meninggalkan bahasa kebebasan.[21] Dari arah lain, ukuran yang sama menolak rekayasa sosial dari atas (*top-down*), entah datang dari negara, dari norma, entah dari elite.[22] Dengan kata lain, satu ukuran dipakai untuk membenarkan peran negara sekaligus untuk membatasinya. Acemoglu juga memperluas ukuran itu pada satu titik. Pettit membedakan kemandirian terhadap kuasa privat (*dominium*) dan kemandirian terhadap kuasa publik (*imperium*), sedangkan Acemoglu menambahkan bahwa kemandirian pertama harus mencakup komunitas, sehingga komunitas dan normanya juga tidak boleh memegang kuasa semacam itu atas anggotanya.[23]

Perluasan itu bertalian dengan metafora "sangkar norma" (*cage of norms*) yang ia kembangkan bersama James Robinson dalam *The Narrow Corridor*. Norma mencegah kekerasan dan memberi kepastian hidup, tetapi norma yang sama membatasi pilihan dan bahkan pikiran, karena komunitas menegakkannya melalui tradisi, tekanan, ancaman pengucilan, dan kadang kekerasan. Komunitas menjadi tempat alami penegakan norma karena orang yang sudah menaati suatu norma cenderung memaksa orang lain menaatinya pula.[24] Komunitas, karenanya, menempati posisi ganda dalam buku ini. Ia menjadi saluran yang tidak tergantikan untuk berbagi dan memercayai pengetahuan, tetapi ia pula yang dapat menjadi penghalang bagi pengetahuan baru.[25] Untuk menjaga keseimbangan itu Acemoglu memasang dua pengaman. Pengaman pertama ialah kebebasan berekspresi sebagai "garis merah" (*redline*) yang tidak boleh dilanggar. Pengaman kedua ialah hak keluar (*right to exit*), yang ia sebut sebagai jalan penting untuk melepaskan diri dari tekanan sebaya dan pemaksaan berbasis norma.[26]

Hak keluar menyimpan persoalan pertama yang dapat diuji dengan ukuran Acemoglu sendiri. Pengujiannya dapat disusun dalam dua langkah. Pertama, menurut uji tatapan mata, seseorang berada dalam dominasi apabila kelangsungan hidupnya bergantung pada pihak lain yang dapat mencabutnya secara sewenang-wenang. Kedua, anggota komunitas yang menggantungkan nafkah, tempat tinggal, dan jaringan sosialnya pada komunitas itu berada dalam ketergantungan yang strukturnya sama dengan ketergantungan pekerja yang takut dipecat. Dari kedua langkah itu, hak keluar yang hanya dijamin di atas kertas tidak membebaskan anggota tersebut, sebab pintu yang terbuka tidak berarti apa-apa bagi orang yang tidak punya tempat untuk pergi. Acemoglu sendiri menyebut hak keluar sebagai wilayah abu-abu, meskipun kekhawatirannya diarahkan ke sisi yang

[19] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 58.
[20] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 27, 63.
[21] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 63–64.
[22] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 59.
[23] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 58–59.
[24] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 37.
[25] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 48.
[26] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 275–276.

berlawanan, yaitu penyalahgunaan hak itu oleh miliarder yang hendak menghindari pajak.[27] Kekhawatiran itu sah, tetapi persoalan yang lebih mendasar terletak pada sisi yang lemah. Hak keluar, dengan demikian, lebih tepat dipahami sebagai hasil nondominasi daripada sebagai sarananya.

Persoalan kedua lebih mendasar karena menyangkut pembenaran ukuran itu sendiri. Dalam kerangka argumen yang diuraikan di muka, nondominasi dibela terutama karena dominasi tidak bersahabat dengan eksperimentasi. Orang yang bergantung pada kemurahan hati pihak lain tidak dapat bebas berekspresi dan memilih. Begitu juga perspektif kelompok yang didominasi hilang dari hal-hal baru yang dicoba masyarakat. Acemoglu mengakui bahwa ada alasan lain untuk menghendaki nondominasi, tetapi alasan-alasan itu sengaja tidak ia bahas.[28] Pembenaran epistemik ini memiliki kekuatan, karena menghubungkan kebebasan dengan kemampuan masyarakat untuk belajar. Pembenaran yang sama memiliki kerapuhan yang dapat dirumuskan sebagai dilema. Bila nondominasi dibela karena memperkaya eksperimentasi, perlindungannya bergantung pada klaim empiris tentang apa yang memperkaya eksperimentasi, sehingga dominasi yang tidak tampak menghambat produksi pengetahuan kehilangan alasan untuk ditolak. Bila nondominasi dibela karena martabat orang yang tidak boleh hidup di bawah kehendak orang lain, sebagaimana tersirat dalam uji tatapan mata, pembenaran itu sudah berada di luar kerangka epistemik buku ini. Bagi pembaca hukum, perbedaan itu tidak kecil. Hak yang dibela karena kegunaannya bagi pengetahuan selalu dapat ditawar ketika kegunaannya diragukan, sedangkan hak yang dibela karena martabat menetapkan batas yang tidak bergantung pada perhitungan itu.

Rekayasa Sosial: Dari Kehendak Umum Ke Kelas Terdidik

Bila nondominasi adalah ukurannya, rekayasa sosial (*social engineering*) adalah penyakit yang dibidik buku ini. Acemoglu mendefinisikannya sebagai upaya membentuk nilai dan pemikiran suatu populasi "secara paksa dan tanpa pemikiran kritis atau debat". Rekayasa sosial dapat digerakkan negara atau kelompok kuat dalam masyarakat, setiap rezim melakukannya dalam kadar tertentu, dan pendidikan sendiri sebagian besar merupakan sarana penanaman nilai.[29] Persoalannya, karena itu, tidak terletak pada upaya mengubah nilai, tetapi pada cara: argumen yang membuka ruang debat berbeda dari pemaksaan nilai yang menutup ruang untuk tidak setuju.

Akar filosofis kecenderungan itu ia telusuri sampai ke kehendak umum (*general will*) Rousseau, yang menyatakan bahwa siapa pun yang menolak tunduk pada kehendak umum akan "dipaksa untuk bebas" (*forced to be free*).[30] Di bawah kehendak umum, tulisnya, tidak ada ruang untuk deliberasi atau debat, dan orang tidak memiliki upaya hukum apa pun terhadapnya.[31] Dari kritik ini Acemoglu memetakan tiga posisi tentang kebebasan. Posisi progresif menyerahkan penentuan kebebasan kepada negara, elite, atau aktivis atas dasar prinsip deontologis atau kontrak sosial. Posisi klasik mempersempit kebebasan menjadi noninterferensi dalam wilayah privat individu. Posisi ketiga, nondominasi, menuntut agar tidak ada orang, norma, atau institusi yang dapat mendominasi orang lain. Dua posisi pertama, menurutnya, sama-sama memikat secara menyesatkan karena sama-sama tidak menghadapi pertukaran (*trade-offs*) secara terbuka: yang satu menyerahkannya kepada kehendak umum, yang lain menyelesaikannya dengan menetapkan wilayah privat.[32] Rumusan inilah yang paling berguna bagi pembaca hukum. Kehendak yang tidak dapat disanggah dan tidak dapat digugat adalah kehendak yang lolos dari pengujian apa pun, dan doktrin yang mengaku tidak menghadapi pertukaran sesungguhnya menyembunyikan siapa yang memutuskannya.

---

[27] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 278. Untuk uji tatapan mata, lihat hlm. 27 dan 63.
[28] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 59.
[29] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 18–19.
[30] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 76.
[31] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 79.
[32] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 86–87.

Langkah berikutnya paling berani dan paling kontroversial. Acemoglu berargumen bahwa kelompok terdidik pascaindustri, yang yakin akan pencerahannya sendiri, menempuh jalan serupa dalam bentuk yang lebih lunak. Kelompok ini tidak seragam, sebab mayoritas lulusan perguruan tinggi tidak menikmati pendapatan dan status setinggi kalangan sektor teknologi atau Wall Street, tetapi isu budaya menyatukan kedua sayap itu dan sekaligus menaikkan kuasa serta status lulusan massal melalui pendidikan, pengaturan bahasa, dan norma, hingga dalam bentuk ekstremnya menjadi "pemolisian pemikiran" (*thought policing*). Gejala ini ia sebut rekayasa sosial yang digerakkan sisi pasokan (*supply-driven*), karena dorongannya datang dari kelompok yang hendak menaikkan statusnya sendiri, tidak dari penguasa yang membutuhkan legitimasi.[33] Pola serupa, menurutnya, tersedia dalam sejarah, karena merumuskan nilai masyarakat kerap menjadi profesi bergengsi, mulai dari Gereja Katolik abad pertengahan, ulama abad kesebelas, kaum Brahmana, hingga birokrat mandarin Tiongkok.[34]

Ia tidak menuduh kepedulian kelompok terdidik itu keliru. Kelompok itu, dalam penilaiannya, sebagian besar benar dalam kekhawatirannya tentang biaya sosial atas ketidaktahuan dan intoleransi, tetapi kebenaran itu tidak membuat upaya rekayasa sosialnya kurang mengganggu.[35] Jarak geografis, ekonomi, dan sosial antara kelompok terdidik dan orang yang mereka anggap berpegang pada ketidaktahuan dan intoleransi justru memperlebar jurang dan mengurangi komunikasi serta empati di antara keduanya.[36] Simpul yang sering terlewat ialah hubungan antara rekayasa sosial dan regulasi. Mengikuti analisis James C. Scott, Acemoglu berargumen bahwa negara membutuhkan masyarakat yang "terbaca" (*legible*), sehingga ia menyederhanakan atau membuang informasi, praktik, dan norma lokal, seperti peta beresolusi rendah yang meniadakan variasi topografi. Para perekayasa sosial berbuat serupa, karena mereka mengabaikan variasi komunitas agar dapat menyatukan semuanya di bawah nilai dan regulasi yang seragam. Rekayasa sosial dan regulasi, karenanya, ia sebut "sekutu alami" (*natural bedfellows*).[37] Di titik inilah dua bagian terpenting buku ini bertemu. Prosedur berlapis yang melumpuhkan selokan, sebagaimana diuraikan di muka, sebagian merupakan akibat dari agenda rekayasa sosial yang sama.[38]

Argumen ini perlu dinilai pada tiga lapis. Pertama, pada lapis tekstual, Acemoglu sendiri mengakui jaraknya dari kasus-kasus historis yang ia jadikan pembanding, sebab masyarakat pascaindustri sangat jauh dari kekerasan Inkuisisi, absurditas Revolusi Kebudayaan, dan pemolisian pemikiran kaum Wahabi.[39] Kedua, pada lapis konseptual, pengakuan itu menimbulkan masalah yang oleh Giovanni Sartori disebut perluasan konsep (*conceptual stretching*).[40] Definisi pembuka menekankan upaya yang bersifat "paksa", sedangkan kasus pascaindustri dijelaskan melalui persuasi, tekanan, dan pengucilan, sehingga istilah rekayasa sosial dapat menjadi cap bagi setiap upaya perubahan nilai yang tidak disukai, dari kiri maupun dari kanan. Ketiga, pada lapis rekonstruktif, masalah itu dapat diperbaiki tanpa meninggalkan buku. Dua unsur yang sudah tersedia dapat dijadikan pertanyaan uji, yaitu ada atau tidaknya ruang untuk debat kritis, yang diambil dari definisi rekayasa sosial, dan ada atau tidaknya upaya bagi orang yang dibebani nilai untuk menyanggah, yang diambil dari kritik atas kehendak umum. Bila keduanya tersedia, perubahan nilai lebih dekat pada persuasi yang sah. Bila keduanya tidak ada, istilah rekayasa sosial layak dipakai.

---

[33] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 236–239.
[34] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 24.
[35] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 236.
[36] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 238.
[37] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 25.
[38] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 289.
[39] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 235.
[40] Giovanni Sartori, "Concept Misformation in Comparative Politics," *American Political Science Review* 64, no. 4 (1970): 1033–1053, https://doi.org/10.2307/1958356.

Teknologi: Arah Yang Dapat Dipilih Dan Soal Siapa Yang Memilih

Pada Bab 9, argumen filosofis di muka bertemu dengan ekonomi teknologi. Teknologi kerap dibayangkan seperti gravitasi, sesuatu yang terjadi dengan sendirinya dan tidak dapat dilawan, dan bab ini dapat dibaca sebagai bantahan atas gambaran itu. Acemoglu merujuk pada hukum pertama Kranzberg (*Kranzberg's first law*), "teknologi tidak baik, tidak buruk, dan tidak pula netral", lalu menambahkan bahwa kenyataan ternyata melampaui hukum itu, sebab teknologi dapat dikembangkan ke arah yang sangat berbeda, sebagian baik dan sebagian buruk. Bila pasar mendorong masyarakat ke paradigma yang merugikan, katanya, ada alasan kuat untuk mengarahkan upaya ke tujuan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.[41] Tata kota menyediakan analogi yang tepat. Kota tidak tumbuh seperti gunung, karena selalu ada orang yang memutuskan letak jalan raya dan permukiman mana yang digusur.

Alternatif yang ia tawarkan ialah "AI pro-pekerja" (*pro-worker AI*), yaitu kecerdasan buatan yang secara eksplisit memperluas produktivitas dan kapabilitas pekerja, sehingga pekerja dapat mengerjakan tugas yang lebih canggih atau sama sekali baru. Bila otomatisasi mengurangi bagian upah dalam nilai tambah, AI pro-pekerja justru dapat menaikkan upah, lapangan kerja, dan bagian upah itu sendiri.[42] Contohnya membumi, yaitu alat bantu bagi teknisi listrik yang menghimpun spesifikasi peralatan dan kasus-kasus terdahulu, mengenali kerusakan melalui sensor dan foto, lalu menghubungkan teknisi dengan ahli jarak jauh.[43] AI semacam itu membutuhkan model khusus bidang yang dilatih dengan data berkualitas tinggi, sedangkan obsesi industri pada kecerdasan umum buatan (*artificial general intelligence*, AGI) mendorong investasi ke model fondasi yang serba bisa. Ukuran keberhasilan industri, menurutnya, berpusat pada "mencapai paritas manusia" (*reaching human parity*), dan keyakinan pada AGI dapat menjadi ramalan yang memenuhi dirinya sendiri. Model yang tampak canggih dipasarkan untuk otomatisasi sebelum matang, sementara arah teknologi lain tidak perlu dijelajahi.[44]

Argumen ini jujur tentang status buktinya. Acemoglu menulis bahwa versi persis alat bantu teknisi listrik itu belum ada, meskipun sebuah perusahaan global sedang mengembangkan beberapa produk terkait bagi insinyur dan teknisi lapangan.[45] Bagian ini, karenanya, merupakan argumen tentang kemungkinan dan belum menjadi temuan. Untuk menilainya, perlu dibedakan dua jenis hambatan. Hambatan teknis menyangkut apakah AI pro-pekerja dapat dibuat dan menguntungkan, dan hambatan ini, menurut Acemoglu sendiri, dapat diatasi karena peluangnya layak dan menguntungkan.[46] Hambatan prinsip menyangkut siapa yang berwenang menentukan bahwa sebuah teknologi layak disebut pro-pekerja, dan karena itu layak didorong dengan insentif atau regulasi. Hambatan pertama dapat dijawab dengan investasi dan data. Hambatan kedua hanya dapat dijawab dengan desain kelembagaan yang buku ini belum menyediakannya.

Kekosongan itu terasa ketika usul teknologi dipertemukan dengan usul regulasi. Acemoglu menghendaki lebih sedikit regulasi *ex ante* untuk pelayanan publik, tetapi menempatkan regulasi media sosial dan AI di urutan teratas, dengan alasan bahwa pembuat kebijakan perlu memusatkan perhatian pada regulasi yang benar-benar kritis.[47] Kedua pandangan itu dapat dibela secara terpisah, tetapi keduanya mengandaikan bahwa pembuat regulasi mampu memilah, padahal Acemoglu sendiri mengaitkan kecenderungan mengatur berlebihan dengan agenda rekayasa sosial kelompok terdidik.[48] Keberatan ini tidak dimaksudkan untuk membantah usulan regulasi AI, tetapi untuk

[41] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 268–269. Kalimat asli yang dikutip Acemoglu ialah "Technology is neither good nor bad; nor is it neutral."
[42] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 262.
[43] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 263–264.
[44] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 266–267.
[45] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 264.
[46] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 266.
[47] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 269, 290.
[48] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 25, 289.

menunjukkan bahwa nondominasi, ukuran buku ini, berlaku pula bagi perancang regulasi dan perancang algoritma. Usulnya untuk media sosial justru memperlihatkan bahwa ia mampu menarik garis yang tegas: semua pendapat, termasuk yang tidak populer dan menyinggung, boleh diekspresikan, sedangkan yang diatur ialah cara platform mempromosikan konten.[49] Pembedaan antara kebebasan berbicara dan kuasa memperbesar jangkauan suara itu layak diuji dalam kerangka hukum mana pun yang menghadapi platform digital.

Deliberasi Dan Kesepakatan Sosial: Obat Yang Belum Teruji

Bila rekayasa sosial adalah penyakitnya, obat yang Acemoglu ajukan ialah deliberasi yang menghasilkan *buy-in*, yaitu penerimaan luas dari berbagai komunitas. Contoh utamanya Majelis Warga Irlandia (*Citizens' Assembly*) pada 2016. Sembilan puluh sembilan warga dipilih secara acak dari rumah ke rumah dan dari kabupaten ke kabupaten agar ruangan itu menyerupai Irlandia sendiri. Mereka mendengar dokter kandungan, ahli hukum, dan para aktivis, lalu berdebat dan memberikan suara, dan 64 persen mendukung pencabutan larangan aborsi. Delapan bulan kemudian, referendum nasional menghasilkan dukungan 66 persen, sehingga hal yang semula dianggap tak terpikirkan, atau setidaknya mustahil tanpa membelah negeri, terlaksana dengan legitimasi yang besar.[50]

Dalam rumusan Acemoglu, *buy-in* tidak sama dengan kebulatan suara. Ambangnya terletak di antara dua batas, karena angkanya tidak mungkin 95 persen warga atau komunitas, tetapi tidak boleh pula sekadar pluralitas.[51] Atas dasar itu ia membedakan kesepakatan sosial (*social compact*) dari kontrak sosial. Kontrak sosial mengandaikan orang telah menyetujui suatu tatanan tanpa debat dan tanpa hak untuk menolak, padahal dalam praktik tidak seorang pun ditanya.[52] Kesepakatan sosial, sebaliknya, dibangun lewat deliberasi nyata yang melibatkan komunitas-komunitas berbeda. Gagasan inilah yang paling dekat dengan cara berpikir hukum. Legitimasi, dalam pandangan ini, lahir dari proses ketika orang sungguh ditanya, tidak dari penalaran filsuf tentang apa yang akan orang setujui.

Acemoglu tidak menutup mata terhadap risiko obatnya sendiri. Ia mengakui bahwa cara memperoleh *buy-in* belum jelas dan baru dapat diketahui lewat eksperimentasi, lalu segera menambahkan bahwa eksperimentasi itu sendiri dapat bermasalah, karena dapat berarti memaksakan praktik dan nilai tertentu kepada komunitas meskipun ditolak, demi mengetahui bagaimana reaksi mereka berkembang.[53] Sebagai penyeimbang, ia menawarkan pedoman bagi pembuat kebijakan dengan menjelaskan alasan setiap kebijakan, mencari kompromi atas dasar kebaikan bersama, selalu terbuka terhadap kritik, menanggapi keberatan dengan serius, dan memasukkan usul perbaikan yang layak.[54]

Bukti yang menopang gagasan ini terdiri atas dua kasus. Selain Majelis Warga Irlandia, Acemoglu menunjuk perjalanan pengakuan pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat, dari referendum 2012 di Maine, Maryland, dan Washington sampai Respect for Marriage Act 2022.[55] Dari keterbatasan itu lahir tiga keberatan. Pertama, kedua kasus menyangkut satu isu moral yang jelas di negara dengan lembaga demokrasi yang mapan, sehingga belum tentu dapat ditiru di masyarakat yang lebih terbelah atau pada isu tanpa titik temu. Kedua, kasus Amerika menunjukkan penerimaan yang

[49] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 295. Kalimat aslinya, "The sweet spot is to allow all opinions, even unpopular and offensive ones, to be freely expressed on social media, but then regulate how social media platforms promote different content."
[50] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 69–70.
[51] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 91.
[52] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 80, 91.
[53] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 91–92.
[54] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 93.
[55] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 92.

tumbuh melalui referendum dan legislasi biasa, sehingga ia mendukung gagasan *buy-in* tetapi tidak secara khusus mendukung forum deliberatif. Ketiga, belum jelas apa yang terjadi bila deliberasi gagal mencapai ambang *buy-in*, padahal rancangan institusi justru diuji ketika deliberasi gagal. Keberatan-keberatan ini tidak membatalkan argumennya, tetapi dengan bukti sebatas itu gagasan *buy-in* lebih tepat dibaca sebagai harapan yang terdokumentasi pada dua kasus daripada sebagai teori yang teruji.

Bagian terakhir dari obat yang ia tawarkan bersifat sehari-hari, yaitu ajakan merebut kembali kehidupan berasosiasi. Mengikuti Tocqueville, ia mencatat bahwa vitalitas sosial Amerika abad kesembilan belas bergantung pada asosiasi yang aktif dan terorganisasi, yang membentuk komunitas baru dan membangun jembatan antarkomunitas. Asosiasi semacam itu tidak lagi menjadi pusat kehidupan Amerika, dan banyak yang tersisa tidak melibatkan pertemuan langsung, sebagaimana tampak bila pengalaman melatih liga bisbol anak atau beribadah dibandingkan dengan keanggotaan dalam organisasi internasional.[56] Di bagian yang sama, ia mengingatkan agar masyarakat berhenti memperlakukan pendidikan sarjana empat tahun sebagai standar formal keterampilan dan kepantasan.[57] Kedua ajakan ini menerapkan nondominasi pada kehidupan sehari-hari. Kebebasan, dalam pengertian ini, memerlukan aturan, tetapi juga tempat bertemu, kepercayaan yang tumbuh dari kebiasaan bertemu, dan penghargaan bagi beragam keahlian.

Satu Pengandaian Di Balik Lima Kelemahan

Lima keberatan yang diajukan di muka tampak berdiri sendiri-sendiri, tetapi kelimanya memiliki bentuk yang sama. Pertama, regulasi yang benar-benar kritis harus dipisahkan dari regulasi yang boleh dipangkas, tetapi kriteria pemisahannya tidak diberikan. Kedua, ambang nondominasi, yaitu seberapa besar redistribusi dan perlindungan yang cukup, diserahkan kepada proses deliberasi masyarakat.[58] Ketiga, batas antara rekayasa sosial dan persuasi yang sah menjadi kabur ketika unsur paksaan tidak hadir. Keempat, pertanyaan tentang siapa yang menentukan bahwa sebuah teknologi layak disebut pro-pekerja belum dijawab. Kelima, ambang *buy-in* dan nasib keputusan bila deliberasi gagal belum dirumuskan. Dalam setiap titik itu, buku ini tidak menarik garisnya sendiri. Pada titik pertama, kedua, dan kelima, penarikan garis diserahkan kepada pembuat regulasi atau forum deliberatif, sedangkan pada titik ketiga dan keempat garis itu dibiarkan terbuka.

Pola itu memperlihatkan satu pengandaian yang tidak dinyatakan, yaitu bahwa tersedia penilai yang mampu menarik garis secara tepat dan tidak sewenang-wenang. Acemoglu memang tidak membiarkan penilai itu tanpa arahan. Ia menegaskan bahwa liberalisme adalah kerangka, bukan himpunan kebijakan dan aturan yang ditatah di batu, dan bahwa keputusan akhir harus diambil oleh masyarakat yang memerintah dirinya sendiri.[59] Ia juga membekali pembuat kebijakan dengan pedoman untuk menjelaskan alasan, terbuka terhadap kritik, dan menanggapi keberatan, sebagaimana diuraikan di muka. Akan tetapi, yang ia tawarkan adalah kebajikan deliberatif bagi penilai, bukan mekanisme kontestasi terhadap penilai. Kebajikan bergantung pada kesediaan pemegang kuasa untuk mendengar, sedangkan mekanisme memberi pihak yang dirugikan sarana untuk memaksa kuasa itu memberi alasan dan, bila perlu, mengoreksinya. Dengan ukuran nondominasi milik Acemoglu sendiri, perbedaan itu menentukan. Kuda yang penunggangnya berjanji untuk tidak menarik tali kekang tetaplah kuda dengan tali kekang.

Buku ini juga memperlihatkan bahwa kriteria dapat dirumuskan bila penulisnya mau. Untuk hubungan komunitas dan kebebasan, Acemoglu menarik garis yang jelas: yang menentukan ialah

[56] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 283.
[57] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 282.
[58] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 85.
[59] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 66.

tindakan dan pembatasan nyata, bukan kata-kata dan pikiran yang tidak menyenangkan.[60] Untuk media sosial, garisnya terletak antara kebebasan berpendapat dan kuasa platform mempromosikan konten. Kedua garis itu menunjukkan bahwa ketiadaan kriteria pada regulasi, ambang nondominasi, dan *buy-in* tidak lahir dari ketidakmungkinan, tetapi dari pilihan untuk menyerahkannya kepada masyarakat. Pilihan itu dapat dibaca dengan cara yang paling ramah, yaitu bahwa kriteria hendak ditemukan lewat eksperimentasi, sejalan dengan premis falibilitas. Ulasan ini pun menuntut satu tambahan. Bila setiap pengetahuan dapat keliru, pengetahuan penilai tentang kriteria juga dapat keliru, dan eksperimentasi atas kriteria itu, sebagaimana diakui Acemoglu sendiri, dapat memaksakan nilai kepada komunitas yang menolaknya. Premis pertama buku ini, karenanya, tidak berhenti pada pembenaran eksperimentasi, tetapi menuntut agar setiap eksperimen kelembagaan disertai jalan bagi pihak yang dibebani untuk menyanggahnya.

Kelemahan ini tidak sama dengan inkonsistensi yang perbaikannya tersedia di dalam buku. Dua pertanyaan uji yang dirumuskan pada bagian keempat, yaitu ada atau tidaknya ruang untuk debat kritis dan ada atau tidaknya upaya bagi pihak yang dibebani untuk menyanggah, dapat diterapkan tidak hanya kepada perekayasa sosial, tetapi juga kepada pembuat regulasi, perancang algoritma, dan penyelenggara forum deliberatif. Yang belum dilakukan buku ini ialah menerapkan ukurannya sendiri kepada penilainya sendiri.

Penutup: Kekuatan, Kelemahan, Dan Pertanyaan Bagi Pembaca Hukum

What Happened to Liberal Democracy? berambisi menyelamatkan liberalisme dengan memindahkan fondasinya dari kontrak sosial ke falibilitas, eksperimentasi, dan nondominasi. Kekuatannya terletak pada tiga hal, yaitu kerangka argumen yang menurunkan kebebasan dari kebutuhan masyarakat untuk belajar, bahasa yang menghubungkan kebebasan dengan keamanan material, dan penjelasan bahwa kegagalan institusi dapat lahir dari kelebihan prosedur, tidak hanya dari kekurangan perhatian. Kelemahannya terletak pada dua titik yang saling berkaitan. Pembenaran nondominasi yang terutama epistemik membuat ukuran itu rentan terhadap perhitungan kegunaan. Garis-garis pemisah yang menentukan penerapannya diserahkan kepada penilai yang belum diuji dengan ukuran yang sama. Obat yang ditawarkan, terutama deliberasi dan AI pro-pekerja, karenanya lebih meyakinkan sebagai arah daripada sebagai program yang teruji.

Bagi pembaca yang menekuni hukum tata negara dan hukum pemilu, buku ini lebih berguna sebagai gudang pertanyaan daripada sebagai peta empiris, sebab Acemoglu menulis tentang Amerika Serikat dan Eropa dan tidak menyentuh konteks Indonesia. Tiga pertanyaan dapat diturunkan darinya. Pertama, bila pemilu diukur dengan "uji tatapan mata" dan tidak hanya dengan ketiadaan larangan, apakah pemilih yang bergantung pada pemberi nafkah, atasan, atau pemberi bantuan dapat disebut memilih secara bebas, meskipun kerahasiaan bilik suara terjaga? Kedua, bila setiap lapisan prosedur lahir dari niat melindungi, dengan ukuran apa hakim dan pembentuk undang-undang menimbang saat prosedur berubah dari pengaman menjadi penghalang? Ketiga, bila legitimasi keputusan publik ditentukan oleh sejauh mana orang sungguh ditanya, bagaimana asas permusyawaratan diterjemahkan ke dalam mekanisme yang memungkinkan pihak yang kalah dalam musyawarah tetap dapat menyanggah hasilnya? Buku ini tidak menjawab ketiganya, tetapi cara buku ini mengajukan pertanyaan itu sudah cukup menjadi alasan untuk membacanya.

Bacaan Tambahan

Sartori, Giovanni. "Concept Misformation in Comparative Politics." *American Political Science Review* 64, no. 4 (1970): 1033–1053. https://doi.org/10.2307/1958356.

[60] Acemoglu, *What Happened to Liberal Democracy?*, 278.